

Implementasi *Additive Ratio Assesment* (Aras) Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasar Kerkap Perspektif Ekonomi Islam

Indri Febrianti¹, Khairiah Elwardah², Eeng Juli Efrianto³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UINFAS Bengkulu

*indrifebrianti@mail.uinfasbengkulu.ac.id*¹, *khairiahelwardah@mail.uinfasbengkulu.ac.id*²,
*eeng.efrianto@mail.uinfasbengkulu.ac.id*³

ABSTRACT

Poverty is a complex issue that requires comprehensive strategies to address, including through the Family Hope Program (PKH), which provides cash assistance to poor households under certain conditions. This study aims to analyze the effectiveness of PKH in improving the welfare of the elderly in Pasar Kerkap Village using the Additive Ratio Assessment (ARAS) method. This method allows for a more systematic evaluation of the program's impact, particularly in the context of Islamic economics. The results indicate that the implementation of ARAS in PKH has improved the targeting of social assistance, although challenges remain in fund disbursement and community understanding. This study provides recommendations to enhance program transparency and socialization, as well as strengthen collaboration between the government and the community to ensure a more effective and sustainable program.

Keywords : Family Hope Program, PKH, elderly, Additive Ratio Assessment, welfare, Islamic economics.

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan strategi komprehensif untuk diatasi, termasuk melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di Desa Pasar Kerkap dengan menggunakan metode Additive Ratio Assessment (ARAS). Metode ini memungkinkan evaluasi yang lebih sistematis terhadap dampak program, terutama dalam konteks ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ARAS dalam PKH telah meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, meskipun masih terdapat tantangan dalam pencairan dana dan pemahaman masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan sosialisasi program, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program yang lebih efektif.

Kata kunci : Program Keluarga Harapan, PKH, lansia, Additive Ratio Assessment, kesejahteraan, ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan strategi komprehensif untuk diatasi. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup stabilitas politik, sosial budaya, dan lingkungan hidup (Hidayat, Nuryadi, & Rusnaini, 2019). Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan persyaratan

tertentu di bidang pendidikan dan kesehatan.

PKH bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan gizi. Melalui program ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa kelompok rentan, seperti ibu hamil, anak usia sekolah, dan lansia, mendapatkan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Shelemo, 2023). Dalam konteks lansia, PKH memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Secara hukum, PKH didasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (JAMSOSNAS) dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta berhak mendapatkan perlindungan sosial yang layak (Direktorat Jenderal Guru & Tenaga Kependidikan, 2020). Namun, meskipun bantuan telah diberikan, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi PKH bagi lansia, khususnya di daerah pedesaan seperti Desa Pasar Kerkap, Bengkulu Utara.

Islam juga menekankan pentingnya kepedulian terhadap kaum dhuafa, termasuk lansia. Dalam ajaran Islam, kemiskinan dapat berdampak negatif pada moral, cara berpikir, serta kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemberian bantuan kepada lansia miskin melalui PKH selaras dengan prinsip Islam dalam memperjuangkan keadilan sosial (Muttakin, Fatwa, & Sarbaini, 2021). Pendamping PKH juga memiliki peran dalam melakukan pemberdayaan agar lansia tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berkontribusi dalam kehidupan sosial mereka.

Untuk menganalisis efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan lansia, penelitian ini mengadopsi metode Additive Ratio Assessment Model (ARAS). ARAS merupakan metode dalam Multi-Criteria Decision Making (MCDM) yang digunakan untuk menganalisis alternatif terbaik berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan (Muttakin et al., 2021). Model ini memungkinkan evaluasi yang lebih sistematis terhadap dampak PKH, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di Desa Pasar Kerkap.

Penerapan metode ARAS diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas PKH bagi lansia, serta membantu dalam perancangan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi PKH dan mencari solusi yang lebih optimal (Willar, Pati, & Pengemnaan, 2021).

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam menambah wawasan tentang efektivitas PKH dalam konteks lansia serta penerapan metode ARAS dalam evaluasi program sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas implementasi PKH, khususnya bagi lansia di daerah pedesaan.

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan literatur akademik dalam bidang ekonomi Islam dan kebijakan sosial. Dengan menggabungkan pendekatan ekonomi Islam dan metode kuantitatif ARAS, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam mengkaji program bantuan sosial berbasis pemerintah.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas efektivitas PKH dalam berbagai konteks. Hidayat et al. (2019) meneliti implementasi PKH dalam memenuhi hak sosial warga lansia miskin di Kecamatan Jebres, Surakarta, dan menemukan bahwa meskipun program ini memberikan manfaat, masih ada kendala dalam distribusi dan pemantauan. Sementara itu, penelitian Shelemo (2023) di Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa efektivitas PKH dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan pendampingan sosial.

Muttakin et al. (2021) mengkaji penggunaan metode ARAS dalam rekomendasi penerima manfaat PKH, dan menemukan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan akurasi penentuan sasaran bantuan. Penelitian Willar et al. (2021) juga menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan lansia melalui program bantuan sosial. Penelitian ini melengkapi kajian terdahulu dengan fokus pada evaluasi PKH lansia di Desa Pasar Kerkep menggunakan metode ARAS.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi ARAS dalam PKH lansia di Desa Pasar Kerkep, tetapi juga mengeksplorasi dampaknya terhadap kesejahteraan lansia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi kebijakan sosial di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di daerah pedesaan. Dengan analisis berbasis ARAS, penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas program bantuan sosial serta memastikan bahwa lansia yang membutuhkan benar-benar mendapatkan manfaat yang maksimal dari PKH.

Additive Ratio Assessment (ARAS)

Additive Ratio Assessment (ARAS) merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang menggunakan fungsi utilitas untuk menilai efisiensi relatif dari berbagai alternatif yang tersedia. Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam berbagai bidang penelitian, seperti pemilihan produk unggulan daerah, seleksi personel militer, rekrutmen karyawan, serta distribusi bantuan sosial (Sudirman et al., 2024). Prinsip dasar dari metode ARAS adalah perbandingan rasio yang memungkinkan identifikasi alternatif terbaik berdasarkan ranking yang diperoleh dari nilai utilitas. Dalam penerapannya, ARAS menggunakan utility degree untuk membandingkan nilai indeks total setiap alternatif dengan indeks optimal dari keseluruhan alternatif yang tersedia (Nani, 2023).

Metode ARAS bekerja berdasarkan asumsi bahwa alternatif yang lebih baik memiliki rasio yang lebih besar untuk mencapai solusi optimal. Proses perbandingan dilakukan dengan membandingkan nilai setiap kriteria terhadap bobot yang telah ditentukan guna mendapatkan alternatif terbaik. Efisiensi relatif dari setiap alternatif dihitung berdasarkan hubungan antara nilai kriteria yang dinormalisasi dan bobot utama yang dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif (Adib & Lestanti, 2020). Konsep utama dalam ARAS menyatakan bahwa suatu permasalahan kompleks dapat dianalisis secara sederhana dengan pendekatan perbandingan relatif. Metode ini membandingkan rasio jumlah nilai kriteria yang telah dinormalisasi terhadap jumlah nilai kriteria tertimbang,

sehingga memungkinkan pemilihan alternatif yang paling optimal (Sundari, 2024).

Sebagai bagian dari metode Multi-Criteria Decision Making (MCDM), ARAS memiliki keterkaitan erat dengan sistem pendukung keputusan. Setiap alternatif dalam metode ini dinilai berdasarkan berbagai kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap pengambilan keputusan, termasuk dalam seleksi penerima bantuan sosial. ARAS juga memungkinkan analisis mendalam terhadap kondisi masyarakat dengan memanfaatkan perbandingan nilai indeks keseluruhan alternatif terhadap alternatif optimal (Satrio et al., 2023).

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu dengan syarat penerima harus menjalankan kewajiban tertentu guna mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Konsep program ini dikenal secara internasional sebagai Conditional Cash Transfer (CCT), yang berfokus pada pemberian tunjangan kepada rumah tangga sangat miskin dengan kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan (Direktorat Jenderal, 2015). Tujuan utama dari PKH adalah meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat dengan memastikan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sasaran utama program ini adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta memenuhi kriteria dalam sektor kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial (Zakiyah, 2017).

Salah satu komponen dari PKH adalah PKH Lansia, yang merupakan bantuan sosial khusus bagi kelompok lanjut usia. Lansia yang berhak menerima bantuan ini adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas dengan tujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas hidup mereka (Akbar et al., 2021). Selain itu, terdapat berbagai kriteria bagi penerima manfaat PKH, yang dikategorikan ke dalam tiga komponen utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam komponen kesehatan, penerima manfaat adalah ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia dini. Pada komponen pendidikan, penerima manfaat terdiri dari anak usia sekolah yang berusia 6 hingga 21 tahun dan masih menempuh pendidikan tingkat dasar, menengah, atau atas. Sementara itu, pada komponen kesejahteraan sosial, penerima manfaat meliputi lanjut usia serta penyandang disabilitas (Kependidikan et al., 2023).

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi di mana individu dan kelompok dalam suatu komunitas dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual. Kata “kesejahteraan” merujuk pada suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan yang stabil, aman, dan sejahtera, sementara “masyarakat” mengacu pada kelompok individu yang memiliki ikatan kuat melalui sistem, tradisi, dan hukum yang sama (Guru et al., 2023). Menurut Suryanti dan Susilowati, kesejahteraan masyarakat ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti perumahan yang layak, kecukupan sandang dan pangan, akses terhadap pendidikan dan

layanan kesehatan yang berkualitas, serta kondisi sosial yang memungkinkan individu untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar mereka dapat hidup dengan layak serta mampu mengembangkan diri guna menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, PKH memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan yang terarah kepada kelompok yang paling membutuhkan. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis pada pemenuhan hak-hak dasar individu dalam komunitas.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alat bagi peneliti dalam menganalisis perencanaan dan membangun argumentasi mengenai arah asumsi penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, tujuan akhirnya adalah untuk menentukan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Sementara itu, dalam penelitian berbasis pernyataan atau narasi, analisis dilakukan dengan bertolak dari data yang diperoleh, menggunakan teori sebagai dasar penjelasan, dan berujung pada pembaruan pernyataan atau hipotesis yang diajukan (Syahputri, Fallenia, dan Syafitri, 2023).

Dalam penelitian ini, pendekatan Additive Ratio Assessment (ARAS) digunakan untuk mengevaluasi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di masyarakat. Implementasi program ini tidak hanya dianalisis dari perspektif sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam kerangka ekonomi Islam yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi tingkat kemiskinan melalui bantuan bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat.

Dampak dari implementasi PKH dalam masyarakat dianalisis melalui tiga aspek utama. Pertama, kesejahteraan masyarakat diukur dari sejauh mana program ini mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat. Kedua, peningkatan kualitas hidup dievaluasi melalui akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Ketiga, pengentasan kemiskinan menjadi aspek utama yang diharapkan tercapai melalui pemberian bantuan yang dapat mendorong kemandirian ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan antara implementasi PKH dan dampaknya terhadap masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam (Elwardah, 2020). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini

bersifat deskriptif, di mana data yang diperoleh dianalisis tanpa manipulasi atau pengujian hipotesis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dari fenomena yang diamati tanpa berfokus pada generalisasi kuantitatif (Prastowo, 2016).

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, dari November 2024 hingga Maret 2025, setelah memperoleh izin penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Lokasi ini dipilih karena memiliki jumlah lansia yang signifikan dan relevan dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu agar dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Abdussamad, 2021). Informan penelitian terdiri dari perangkat desa serta penerima manfaat PKH yang memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai program tersebut (Aryanto, 2018). Berikut daftar informan penelitian:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Edi Amran	42 Tahun	Perangkat Desa
2	Sari Utari	36 Tahun	Perangkat Desa
3	Rukiyah	67 Tahun	Penerima PKH
4	Hermawati	65 Tahun	Penerima PKH
5	Nurtiah	82 Tahun	Penerima PKH
6	Yurni	68 Tahun	Penerima PKH
7	Khodiyah	71 Tahun	Penerima PKH
8	Alamiah	71 Tahun	Penerima PKH

Sumber: Olahan peneliti

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi di lapangan (Sulung & Muspawi, 2024). Sementara itu, data sekunder meliputi berbagai dokumen, buku, jurnal, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian (Sari & Zefri, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami kondisi sosial masyarakat penerima PKH. Wawancara dilakukan dengan informan terpilih guna menggali informasi mendalam mengenai dampak program terhadap kehidupan mereka. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk merekam data yang relevan dalam bentuk tulisan, gambar, atau video.

Dalam analisis data, penelitian ini mengadopsi teknik yang dikembangkan oleh Bogdan dalam Sugiyono (2019), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan informasi agar lebih terstruktur. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif, tabel, dan grafik

untuk memudahkan analisis. Akhirnya, kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di Desa Pasar Kerkap, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal dalam pelaksanaan program bantuan sosial serupa di masa depan.

Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah Desa Pasar Kerkap

Desa Pasar Kerkap terletak di Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan berbagai sumber, asal-usul nama desa ini memiliki dua versi yang berkembang di masyarakat. Versi pertama menyatakan bahwa nama Pasar Kerkap ditetapkan melalui musyawarah warga. Sementara itu, versi kedua mengaitkan nama "Kerkap" dengan kisah seekor buaya yang diyakini mendiami sungai di sebelah timur desa. Buaya tersebut dikenal ganas dan sering mengeluarkan suara "kap kap kap" saat menangkap mangsanya, yang kemudian diadaptasi menjadi nama desa (Lab.IikomUMBengkulu, 2024).

Seiring waktu, kata "Pasar" ditambahkan di depan "Kerkap" setelah pembangunan pasar pertama di desa ini pada masa kolonial, yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat marga Kerkap dan marga lainnya.

Kondisi Geografis dan Iklim

Desa Pasar Kerkap berbatasan dengan Desa Air Napal di sebelah utara, Desa Senaba di timur, Desa Tepi Laut di selatan, serta Samudera Hindia di sebelah barat. Wilayah desa memiliki luas sekitar 323,6 hektar, di mana 25% merupakan area pemukiman, sementara sisanya digunakan untuk perkebunan dan pertanian. Desa ini memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang memengaruhi produktivitas pertanian di wilayah tersebut (Prasetya Nugraha, 2017).

Kondisi Sosial

Penduduk Desa Pasar Kerkap berasal dari berbagai daerah dengan mayoritas etnis Rejang. Tradisi musyawarah mufakat dan gotong royong telah menjadi bagian integral kehidupan sosial masyarakatnya. Struktur kependudukan desa ini terdiri dari 623 laki-laki, 704 perempuan, dan 395 kepala keluarga, yang tersebar dalam tiga dusun. Dalam hal pendidikan, terdapat berbagai tingkatan mulai dari pra-sekolah hingga jenjang sarjana, dengan jumlah terbanyak pada tingkat sekolah dasar dan menengah pertama.

Dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, diikuti oleh sektor peternakan, perdagangan, usaha kecil, pegawai negeri sipil (PNS), dan buruh. Fasilitas umum yang tersedia meliputi balai desa, masjid, mushola, sarana olahraga, posyandu, serta jaringan jalan desa yang terdiri dari aspal dan jalan tanah (Prasetya Nugraha, 2017).

Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Pasar Kerkap cukup beragam, dengan kesenjangan yang nyata antara kelompok ekonomi menengah ke bawah dan menengah ke atas. Mayoritas penduduk bekerja di sektor non-formal seperti pertanian dan usaha kecil, sementara sebagian lainnya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, tenaga honorer, dan guru. Hasil survei awal menunjukkan bahwa masih banyak warga desa yang bergantung pada Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya lansia. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah usia lanjut yang menghambat produktivitas kerja, sehingga banyak lansia tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka secara mandiri.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut kondisi sosial ekonomi penerima PKH lansia di Desa Pasar Kerkap serta faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya Pasal 37 yang mengatur penyaluran bantuan sosial PKH. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui lembaga penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti Bank Himbara, yang mencakup Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Proses penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi penerima manfaat serta kesiapan sistem pencairan bantuan. Selain itu, jadwal pencairan bersifat fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, dan bantuan dapat diberikan dalam bentuk tunai atau non-tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Program PKH Lansia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia dari keluarga miskin melalui intervensi sosial yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan tunai, tetapi juga mencakup pendampingan sosial untuk memastikan pemanfaatan bantuan yang optimal. Di Desa Pasar Kerkap, program ini melibatkan pendamping sosial PKH yang bertugas mendampingi dan memonitor penerima manfaat. Pendamping memiliki peran penting dalam memastikan bantuan diterima tepat sasaran, memberikan edukasi terkait pemanfaatan dana, serta mengoordinasikan pertemuan rutin bagi para penerima. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala, seperti keterlambatan pencairan, kurangnya kegiatan edukatif bagi lansia, dan tantangan administratif dalam proses verifikasi dan evaluasi penerima manfaat.

Proses pengumpulan data untuk menentukan penerima manfaat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping PKH, pemerintah desa, kepala dusun, dan masyarakat. Pendamping PKH bertanggung jawab untuk memvalidasi data dan melakukan verifikasi lapangan terhadap calon penerima manfaat. Metode yang digunakan dalam pendataan mencakup survei langsung ke rumah-rumah lansia dan wawancara dengan keluarga mereka, untuk memastikan bahwa lansia yang benar-benar membutuhkan mendapatkan prioritas dalam program bantuan sosial ini.

Kriteria utama dalam menilai kesejahteraan lansia meliputi aspek ekonomi, kesehatan, dan kondisi sosial. Metode ARAS digunakan untuk melakukan penilaian multi-kriteria secara objektif, membantu pendamping PKH dalam menentukan tingkat kesejahteraan lansia. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan administrasi, kondisi kesehatan, aksesibilitas geografis, dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur program. Pendamping PKH berperan dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan yang dialami oleh lansia selama proses penerimaan bantuan.

Pendamping PKH juga melakukan pendekatan langsung kepada lansia dan keluarganya untuk memahami permasalahan yang dihadapi serta mencari solusi yang tepat. Koordinasi dengan perangkat desa dan dinas sosial menjadi langkah penting dalam menyederhanakan proses administratif dan memastikan bahwa setiap penerima manfaat mendapatkan haknya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Evaluasi keberhasilan program dilakukan secara berkala untuk menilai dampak program terhadap kesejahteraan lansia dan mengidentifikasi hambatan yang muncul.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat, termasuk lansia, dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk memahami pengalaman dan pandangan penerima manfaat, dilakukan wawancara dengan enam lansia di Desa Pasar Kerkap. Wawancara ini bertujuan untuk menggali manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, serta harapan mereka terhadap program PKH di masa mendatang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para lansia memiliki pandangan yang beragam mengenai bantuan yang diberikan. Rukiyah (67) menyatakan bahwa bantuan sebesar Rp200.000 per bulan, yang sering kali dicairkan setiap tiga bulan sekali, sangat membantu untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hermawati (65) menambahkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu, meskipun tidak sepenuhnya mencukupi. Nurtiah (82) mengungkapkan bahwa bantuan ini sangat bermanfaat untuk membeli obat dan kebutuhan dapur. Yurni (68) dan Khodiyah (71) juga merasakan manfaat dari bantuan ini, meskipun mereka mengakui bahwa jumlahnya tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Alamiah (71) menambahkan bahwa ia menggunakan bantuan untuk belanja kebutuhan rumah tangga.

Terkait keadilan dalam distribusi bantuan, Rukiyah (67) merasa bahwa bantuan tersebut cukup adil, meskipun ada beberapa yang lebih membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Hermawati (65) setuju, menekankan bahwa kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Nurtiah (82) berharap agar bantuan dapat ditingkatkan, terutama bagi lansia yang sakit. Yurni (68) juga menginginkan perhatian lebih bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan. Khodiyah (71) dan Alamiah (71) sepakat bahwa meskipun bantuan sudah cukup adil, evaluasi terhadap besaran bantuan perlu dilakukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal partisipasi kegiatan PKH, Rukiyah (67) menyatakan bahwa ia pernah mengikuti kegiatan, tetapi saat ini tidak ada lagi pertemuan anggota PKH. Hermawati (65) juga mengungkapkan bahwa kegiatan sosial jarang diadakan. Nurtiah (82) tidak pernah ikut karena keterbatasan fisik, sementara Yurni (68) merasa kurang mendapatkan informasi

yang jelas. Khodiyah (71) dan Alamiah (71) juga mencatat bahwa mereka hanya pernah sekali ikut pertemuan.

Mengenai kendala dalam mengakses bantuan, Rukiyah (67) menjelaskan bahwa pencairan yang tidak menentu menjadi masalah utama. Hermawati (65) menambahkan bahwa sebaiknya pencairan dilakukan lebih teratur. Nurtiah (82) mengungkapkan kesulitan dalam pencairan bagi lansia yang tidak bisa berjalan jauh, sedangkan Yurni (68) mengalami kesulitan antri di tempat pencairan. Khodiyah (71) dan Alamiah (71) juga berharap agar proses pencairan dapat diperbaiki.

Ketika ditanya tentang harapan mereka untuk program PKH di masa depan, Rukiyah (67) berharap agar bantuan dapat dicairkan lebih rutin. Hermawati (65) menginginkan peningkatan nominal bantuan, terutama bagi yang sangat membutuhkan. Nurtiah (82) berharap adanya tambahan program kesehatan, sementara Yurni (68) ingin kegiatan sosial dan pelatihan keterampilan bagi lansia. Khodiyah (71) dan Alamiah (71) juga berharap agar bantuan dapat disalurkan dalam bentuk lain, seperti sembako atau insentif tambahan bagi lansia yang tidak memiliki keluarga untuk merawat mereka.

PEMBAHASAN

Implementasi Additive Ratio Assessment (ARAS) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Lansia di Desa Pasar Kerkap: Perspektif Ekonomi Islam

Metode Additive Ratio Assessment (ARAS) diterapkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan bahwa bantuan sosial bagi lansia di Desa Pasar Kerkap diberikan secara tepat sasaran. Pendamping PKH bekerja sama dengan perangkat desa dalam mengumpulkan data melalui survei langsung, wawancara dengan keluarga lansia, serta verifikasi lapangan guna memastikan bahwa penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Wawancara dengan Bapak Edi Amran, 17 Februari 2025).

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam (al-'adl), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 135, yang menegaskan pentingnya berlaku adil dalam setiap situasi tanpa memihak kepada golongan tertentu. Dengan menggunakan metode ARAS, prioritas diberikan kepada lansia yang berada dalam kondisi ekonomi dan kesehatan yang paling rentan, sehingga alokasi bantuan sosial menjadi lebih terstruktur dan akurat (St Nur & Syahidah Dzatun, 2024).

Selain itu, metode observasi langsung juga diterapkan dalam proses verifikasi untuk memastikan kondisi lansia yang membutuhkan bantuan, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun aksesibilitas mereka terhadap fasilitas sosial (Wawancara dengan Ibu Sari Utari, 17 Februari 2025). Implementasi metode ARAS ini juga didukung oleh penelitian Muttakin dan Fatwa (2021), yang menunjukkan bahwa sistem berbasis multi-kriteria mampu meningkatkan objektivitas seleksi penerima manfaat dalam program bantuan sosial.

Dampak Penerapan Metode ARAS terhadap Kesejahteraan Lansia dan Masyarakat di Desa Pasar Kerkap

Penggunaan metode ARAS dalam PKH memberikan dampak positif dalam peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial bagi lansia. Dengan pendekatan ini, distribusi bantuan menjadi lebih terstruktur dan mengurangi kesalahan dalam penentuan

penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan metode ini, jumlah lansia yang benar-benar membutuhkan dan mendapatkan bantuan meningkat, sementara kemungkinan ketidaktepatan alokasi bantuan berkurang secara signifikan (Muttakin & Fatwa, 2021).

Dari perspektif ekonomi Islam, distribusi bantuan sosial melalui metode ini mencerminkan prinsip keadilan ekonomi yang juga diterapkan dalam konsep zakat dan sedekah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Hasyr ayat 7, sistem distribusi kekayaan harus dilakukan secara merata agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Dengan metode ARAS, alokasi bantuan lebih terarah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok rentan, seperti lansia yang mengalami keterbatasan ekonomi dan kesehatan.

Selain aspek keadilan, penerapan metode ini juga memperkuat aspek kemaslahatan (masalah) dalam Islam. Kebijakan sosial yang tepat sasaran dapat membantu meningkatkan taraf hidup lansia penerima manfaat, baik dari segi pemenuhan kebutuhan dasar maupun akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu, implementasi metode ARAS dalam PKH tidak hanya meningkatkan efisiensi program bantuan sosial tetapi juga memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Tantangan dan Kendala dalam Penerapan ARAS pada PKH Lansia di Desa Pasar Kerkap dalam Perspektif Ekonomi Islam

Meskipun metode ARAS dalam PKH membawa berbagai manfaat, terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknis dalam melakukan survei serta verifikasi data. Proses pengumpulan data yang memerlukan kunjungan langsung ke rumah-rumah lansia sering kali terhambat oleh kurangnya tenaga pendamping serta keterbatasan anggaran operasional (Wawancara dengan Bapak Edi Amran, 17 Februari 2025).

Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap metode seleksi berbasis multi-kriteria juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa keluarga lansia menganggap bahwa bantuan sosial diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan individu. Hal ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman dan protes dari masyarakat yang merasa tidak mendapatkan bantuan, meskipun mereka tidak memenuhi kriteria prioritas (Kurniawan et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai sistem seleksi berbasis ARAS agar masyarakat memahami bahwa bantuan diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan yang obyektif.

Namun, tantangan dalam implementasi ARAS juga perlu dikaji dari perspektif Islam. Ketidakpastian pencairan dana dan kurangnya sosialisasi dapat menjadi faktor yang menghambat efektivitas distribusi bantuan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan (al-'adl) harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pendistribusian bantuan sosial. Oleh karena itu, sistem distribusi yang tidak merata atau pencairan dana yang tidak menentu dapat menimbulkan ketidakadilan di antara penerima manfaat. Hal ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain" (HR. Ahmad),

sehingga pemerintah dan pendamping PKH memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan secara tepat waktu dan adil.

Tantangan lainnya adalah ketidakstabilan data penerima manfaat. Beberapa lansia mengalami perubahan kondisi ekonomi atau kesehatan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga memerlukan pembaruan data secara berkala. Namun, proses pemutakhiran data sering kali terkendala oleh birokrasi yang panjang serta keterbatasan sistem pencatatan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan integrasi sistem data yang lebih modern agar proses pemutakhiran dapat dilakukan secara lebih efisien.

Secara keseluruhan, implementasi metode ARAS dalam PKH untuk lansia di Desa Pasar Kerkap memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Meskipun terdapat berbagai tantangan, pendekatan ini selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam, serta mampu meningkatkan efisiensi distribusi bantuan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam pengembangan sistem verifikasi data serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme seleksi berbasis multi-kriteria untuk memastikan keberlanjutan program yang lebih efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode Additive Ratio Assessment (ARAS) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bagi lansia di Desa Pasar Kerkap telah berjalan sesuai dengan mekanisme seleksi multi-kriteria yang mempertimbangkan aspek ekonomi, kesehatan, dan sosial. Proses verifikasi dilakukan melalui survei dan wawancara untuk memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran.

Dampak dari implementasi metode ARAS terhadap kesejahteraan lansia menunjukkan adanya peningkatan dalam kondisi ekonomi dan kesehatan. Bantuan yang diberikan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, meskipun jumlahnya terkadang masih kurang. Selain itu, ARAS membantu pendamping PKH dalam memprioritaskan lansia dengan kondisi kesehatan yang lebih rentan. Namun, partisipasi sosial lansia masih terbatas akibat minimnya sosialisasi dan informasi terkait program ini.

Tantangan utama dalam implementasi ARAS dalam PKH Lansia meliputi ketidakpastian dalam pencairan dana, kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme program, distribusi bantuan yang belum merata, serta kendala aksesibilitas bagi lansia yang memiliki keterbatasan fisik. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi bantuan sosial harus didasarkan pada prinsip keadilan (al-'adl) agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata dan inklusif.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi diberikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan metode ARAS dalam PKH Lansia:

1. Bagi praktisi dan pendamping PKH, perlu meningkatkan transparansi dalam proses seleksi dan pencairan dana serta memberikan informasi yang lebih jelas kepada penerima manfaat. Sosialisasi yang lebih aktif juga diperlukan agar lansia memahami hak dan prosedur administrasi, sehingga dapat mengurangi potensi kendala dalam

penyaluran bantuan.

2. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas ARAS dalam distribusi bantuan sosial pada skala yang lebih luas. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam proses verifikasi dan distribusi bantuan dapat dieksplorasi guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan data.
3. Bagi pemangku kebijakan, perlu adanya kebijakan yang lebih fleksibel dalam pencairan bantuan serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas serta keberlanjutan program PKH bagi lansia. Dengan perbaikan tersebut, penerapan metode ARAS dalam PKH dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan lansia secara adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamad, Z., and Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st edn (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021)
- Erikson, Erik H., *The Life Cycle Completed* (New York: Norton & Company, 2021)
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016)
- Purhantara, W., *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2010)

Artikel Jurnal:

- Adib, D. F., and S. Lestanti, 'Penerapan Metode Additive Ratio Assessment (ARAS) untuk Mendukung Penilaian Kinerja Guru pada SDN Sentul 02', *Journal of Informatics, Information System, Software Engineering and Applications*, 3.1 (2020), 1–13
- Akbar, F., Darmiati, Arfan, F., and A. A. Z. Putri, 'Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo', *Jurnal Abdidias*, 2.2 (2021), 392–97
- Andika, S., 'Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu)', *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2021), 44–55
<https://doi.org/10.56633/jsie.v2i1.227>
- Aryanto, U., 'Metode Penelitian', *Metode Penelitian*, 1 (2018), 32–41
- Elvina, E., and M. Zebua, 'Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening', *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3.1 (2019), 1–9
- Elwardah, K., 'Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2020), 59–71
<https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.3351>
- Fikriyyah, F., 'Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 7', *Ulumul Qur'an*, 2 (2020), 5
- Hidayat, B. W., M. H. Nuryadi, and Rusnaini, 'Implementasi Program Keluarga Harapan terhadap Pemenuhan Hak Sosial Warga Lansia Miskin (Studi di Kecamatan Jebres

- Kota Surakarta)', PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan, 14.1 (2019), 15–28
- Hidayanti, M., and M. Sudirman, 'Tinjauan Hukum Islam terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)', Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 9 (2022), 156–65
- Ibrahim, I., 'Peran Program Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Segumbang Kabupaten Tanah Bumbu dalam Perspektif Ekonomi Islam', Jurnal Ekonomi Islam, 8 (2021), 8–31
- Isa Rosita, W. N. A., R. W. Auwinaldi, Y. Servanda, S. Sumardi, and J. Jamal, 'Implementasi Metode Additive Ratio Assessment sebagai Penentuan Penerimaan Karyawan Baru', Metik Jurnal, 6.2 (2022), 157–64
- Isna, N., 'Pandangan Islam terhadap Program Keluarga Harapan', Jurnal Ekonomi Islam, 8 (2020), 8–31
- Kurniawan, D., et al., 'Evaluasi Program Keluarga Harapan', Jurnal Pembangunan Sosial, 4.3 (2020), 45–56
- Muttakin, F., K. N. Fatwa, and S. Sarbaini, 'Implementasi Additive Ratio Assessment Model untuk Rekomendasi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan', Sitekin: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, 19.1 (2021), 40–48
- Nugraha, R., and H. Setiawan, 'Implementasi ARAS dalam Distribusi Bantuan Sosial', Jurnal Teknologi Informasi Sosial, 8.3 (2023), 56–78
- Nur, S., and S. Dzatun, 'Prinsip Keadilan Sosial dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an dan Hadist', Jurnal Studi Islam, 4.1 (2024), 35–51
- Sari, A. P., and Supiyandi, 'Sistem Pendukung Keputusan Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan menggunakan Metode Additive Ratio Assessment', Journal of Computing and Informatics Research, 3.3 (2024), 215–24
- Sari, M. S., and M. Zefri, 'Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura', Jurnal Ekonomi, 21.3 (2019), 311–25
- Sastrawan, B., A. Samsi, and G. G. Seran, 'Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat', Karimah Tauhid, 3.1 (2024), 473–79
- Satrio, R., J. Wahyudi, and R. Supardi, 'Implementasi Metode Additive Ratio Assessment (ARAS) untuk Seleksi Penerimaan Beasiswa pada SMA Negeri 4 Bengkulu Tengah', Jurnal Media Infotama, 19.2 (2023), 351–57
<https://doi.org/10.37676/jmi.v19i2.4231>
- Shelemo, A. A., 'Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Sukamaju Kabupaten Bengkalis', Nucl. Phys., 13.1 (2023), 104–16
- Sundari, S., 'Implementasi Metode Additive Ratio Assessment (ARAS) dalam Penilaian Kinerja Perangkat Desa pada Kantor Pemerintahan Desa Tebing Linggahara', Journal of Computing and Informatics Research, 3.3 (2024), 215–24.

Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 2 (2025) 812 - 233 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i2.728

Dokumen Resmi:

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Pelaksanaan PKH (Jakarta: Kemendikbud, 2020)

Kementerian Keuangan, Kajian Program Keluarga Harapan (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2015)